

The Role of Members of the North Sumatra DPRD from the Gerindra Faction in Pursuing Community Aspiration

Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat

Azizul Hakim Nugraha

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ahngraha2100@gmail.com

How to Cite :

Nugraha, A. H. (2022). The Role of Members of the North Sumatra DPRD from the Gerindra Faction in Pursuing Community Aspiration. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [15 Mei 2022]

Accepted [27 Mei 2022]

KEYWORDS

*Gerindra Faction,
Community Aspiration,
DPRD SUMUT*

*This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, DPRD Sumatera Utara khususnya Fraksi Gerindra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi yang diteliti adalah informasi dari fraksi Gerindra, Staf dan Pengurus Fraksi Gerindra yang merupakan anggota DPRD Sumut yang berjumlah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan mengenai bentuk-bentuk aspirasi masyarakat yaitu aspirasi dalam bentuk lisan, perorangan, unjuk rasa, maupun kunjungan kerja. Aspirasi tersebut tidak langsung diberi tanggapan atau penyelesaian namun masih melalui mekanisme mengikuti tata cara di lembaga Legislatif Daerah Sumatera Utara. Aspirasi masyarakat yang ditampung akan di sempurnakan untuk menjadi sebuah kebijakan terealisasinya suatu kebijakan tergantung oleh pihak eksekutif, disisi lain lembaga legislatif hanya menyarankan dan mengawasi segala kinerja dan kebijakan badan eksekutif.

ABSTRACT

This study discusses the role of members of the North Sumatra DPRD from the Gerindra Faction in Pursuing Public Aspirations. In accordance with Law Number 23/2014 concerning Regional Government, the DPRD of North Sumatra, especially the Gerindra Faction. This research was conducted using a qualitative approach. The information studied is information from the Gerindra faction, staff and management of the Gerindra Faction who are members of the North Sumatra DPRD, totaling 5 people. The results showed that the forms of community aspirations were aspirations in the form of oral, individual, demonstration, or work visits. The aspiration was not immediately responded to or resolved, but still through the mechanism following the procedures in the North Sumatra Regional Legislative Institution. The aspirations of the people who are accommodated will be perfected to become a policy, the realization of a policy depends on the executive, on the other hand the legislature only recommends and supervises all performance and policies of the executive body.

PENDAHULUAN

Lahirnya Parpol di Indonesia pertama kali lahir di zaman kolonial Belanda pada tahun 1912, saat itu partai yang pertama adalah De Indische Partij. Lahirnya partai merupakan kesadaran nasional akan perpolitikan karena ikut berperan dalam perjuangan nasional pada waktu itu agar

Indonesia merdeka. Tujuan partai politik pada saat itu mencari kekuasaan politik sehingga dapat memiliki kekuasaan politik menentukan arah Negara pada masa itu. Berbicara tentang partai politik tentu mempunyai dasar filosofi dari ideologi perjuangan bangsa dan cita-cita yang diinginkan. Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem perwakilan didalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang No. 32/2004 menjelaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan peranannya, anggota DPRD Sumut melaksanakan memaksimalkan kewajibannya, dengan melaksanakan kegiatan yang namanya Reses. Sesuai dengan peraturan DPRD SUMUT Nomor 4/ K/ 2014 tentang Tata Tertib DPRD SUMUT dalam pasal 118 bahwasanya kegiatan Reses di DPRD Sumatera Utara di laksanakan tiga kali dalam setahun. Dalam kegiatan ini anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya (Dapil) dimana masyarakat berhadapan langsung dan berbicara terbuka kepada anggota DPRD. Sebagai wakil rakyat DPRD melaksanakan kegiatan ini guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Dalam Reses ini, anggota DPRD menerima segala keluhan rakyat untuk ditindaklanjuti.

LANDASAN TEORI

Fraksi dalam DPRD dibentuk dengan tujuan peningkatan efisiensi DPRD dalam bertugas sebagai wakil rakyat. Adanya lembaga fraksi lengkap dengan susunan kepengimpinannya memudahkan komunikasi antara fraksi dan DPRD itu sendiri, terutama dalam membahas hal-hal politis atau pembicaraan teknis intern dewan. Setiap fraksi memilih pimpinannya sendiri. Fraksi dan susunan pimpinannya secara garis besar adalah merupakan gambaran perwakilan partai politik tersebut di DPRD. Suara fraksi disalurkan lewat anggota-anggotanya yang ada di komisi Dewan. Sama halnya dengan fraksi PKB, baik secara perseorangan dapat melakukan kunjungan ke dapilnya guna menyerap keinginan mereka.

Anggota setiap fraksi harus mematuhi aturan dan peraturan tertentu, yang diadopsi selama konferensi pendiri pada tahun 2014 dan diubah kemudian: Fraksi di DPRD Partai Liberal (Liberalno) Rusia Bersatu (United no Vladimir Putin) Yabloko (Ya budet mir) Rumah Kami – Persatuan Rusia (Nash dom – russkaia sotsial'naia) "Demokrasi Berdaulat" Uni Seluruh Rusia (Vsemirnaya union'sovetskaya demokratiya') Partai Sosial Demokrat Rusia (Socialdemokraticheskie partii Rossii) Partai Komunis Rusia (Kommunističeskoe parti Rossii) Rodina ("Tanah Air") Pihak lain (partizaniy) Semua fraksi harus memenuhi dua syarat: sekurang-kurangnya satu anggota hadir dalam semua rapat DPRD; dan paling sedikit 10% dari total perolehan suara dewan distrik dalam pemilihan.

Seperti halnya anggota dewan yang melaksanakan kegiatan reses semua aspirasi yang ditampung dari masyarakat dan akan dipertimbangkan nantinya saat rapat paripurna. Untuk itu anggota dewan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut agar dapat dianggarkan untuk tahun berikutnya. Disisi lain musrembang juga merupakan program tahunan untuk mengumpulkan keinginan dan harapan masyarakat dan tokoh terhadap kondisi pembangunan agar disampaikan di saran RKPD.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan atau gambar dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Bogan Tylor dalam buku Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah hasil dari sumber sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara informasi dari fraksi Gerindra, Staf dan Pengurus Fraksi Gerindra yang merupakan anggota DPRD Sumut yang berjumlah 5 orang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada anggota DPRD Sumatera Utara fraksi Gerindra, Staf dan pengurus fraksi Gerindra. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literatur dan sumber lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview), persentasi hasil pengamatan.

Teknik Analisis Data

Adapun Langkah-langkah analisis data yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data dari hasil wawancara, persentasi hasil pengamatan
- b. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya;
- c. Mencari keterkaitan antar tema;
- d. Interpretasi atas temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan beberapa teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu Fraksi di DPRD Sumatera Utara yang agak berbeda dengan Fraksi lainnya. Ini disebabkan karena Fraksi ini terdiri dari tiga partai yang digabungkan menjadi satu Fraksi, yaitu Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) Ketiga Partai digabungkan menjadi satu mengingat tidak mencapai ambang batas untuk membentuk satu fraksi. Sehingga Fraksi ini pun sedikit berbeda dengan Fraksi lain dari sisi jumlah partainya. Namun hal ini tentu tidak menjadi penghalang bagi para anggota fraksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Fraksi Partai Keadilan Bangsa terdiri dari 5 (orang) anggota DPRD.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dimana anggota DPRD berkewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya hingga menjadi suatu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Bangsa, dalam menyerap aspirasi masyarakat digunakan beberapa metode antara lain dengan Reses dan Kunjungan Kerja. Reses dan Kunjungan Kerja merupakan metode formal yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam metode informal, anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat dengan cara melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri, melalui kegiatan masing-masing partai, dialog dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan serta pendekatan kultural dengan mengikuti kegiatan tradisi masyarakat setempat.

Sebagai salah satu metode dalam menyerap aspirasi masyarakat, setiap anggota DPRD wajib melaksanakan Reses maksimal 3 kali dalam setahun. Dalam melaksanakan Reses, setiap anggota DPRD akan diatur jadwalnya oleh staff masing-masing dan difokuskan pada satu kabupaten saja tiap masa Reses. Selama masa Reses anggota DPRD akan menyiapkan berbagai materi yang akan dibahas dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antara masyarakat dengan anggota DPRD yang bersangkutan. Setelah selesai melaksanakan Reses,

anggota DPRD akan mengumpulkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat untuk dapat dibahas secara bersama-sama dengan legislator lainnya dan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun, dari semua aspirasi yang sudah tertampung, nantinya akan dibahas lagi di dalam fraksi masing-masing agar dapat ditemukan isu prioritas yang harus segera direalisasikan. Karena, tidak semua aspirasi masyarakat dapat direalisasikan oleh DPRD mengingat jumlahnya yang sangat banyak. Setelah dibahas oleh masing-masing fraksi, maka aspirasi masyarakat yang telah ditampung tadi akan di paripurnakan bersama-sama dengan eksekutif.

Dalam hal pelaksanaan, Pemerintah Provinsilah yang berwenang akan hal tersebut. Namun DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tentunya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan penuturan anggota DPRD yang penulis wawancarai. Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, anggota DPRD juga mendapat beberapa kendala seperti halnya pada masalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini sering menjadi kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD mengingat anggaran yang dibutuhkan dalam merealisasikan pembangunan fisik tidaklah sedikit. Sehingga banyak aspirasi masyarakat tentang pembangunan fisik sering tidak bisa terealisasi akibat tidak cukupnya anggaran. Kendala lainnya adalah masalah prioritas aspirasi. Dari sekian banyaknya aspirasi masyarakat yang telah ditampung oleh anggota DPRD, maka mana yang menjadi prioritas itulah dibahas di rapat paripurna. Hal ini tentu menjadi kendala bagi anggota dewan dalam memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan itu, setiap anggota DPRD secara berkala mengidentifikasi berbagai permasalahan di daerah pilihannya masing-masing untuk membuat strategi agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakatnya dalam kegiatan rapat kerja maupun saat kunker. Hasil pengumpulan aspirasi masyarakat itu merupakan target orientasi Anggota DPRD terhadap dapilnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dilakukan oleh anggota dewan selaku keterwakilan rakyat di lembaga legislatif memiliki beberapa metode. Peranan anggota DPRD merupakan pengawas dari jalannya pemerintahan serta menjadi penyambung dari aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Peranan anggota DPRD fraksi Gerindra dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan secara optimal. Dapat dilihat secara umum dari upaya-upaya yang telah dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara, Fraksi Gerindra dalam menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut baik secara formal dalam arti penyerapan aspirasi masyarakat dengan reses dan kunjungan kerja maupun secara informal dimana dengan insiatif anggota DPRD seperti kegiatan-kegiatan partai, dialog lembaga swadaya masyarakat atau pendekatan kultur masyarakat setempat. Aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dirapatkan dalam rapat komisi lalu diserahkan kepemimpinan DPRD dan dirapatkan kembali ke paripurna bersama pihak eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannus T.H. Siahaan, (2020). *Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat*, Medan,
- Lahamit, S. (2021). *Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi fungsi legislasi anggota DPRD provinsi riau*. jurnal ilmu administrasi publik